

**SINKRONISASI HUKUM PIDANA DAN ETIK POLRI DALAM
KASUS PERZINAAN ANGGOTA POLRI: PROPORSIONALITAS
SANKSI DAN KEWENANGAN DISKRESI ATASAN YANG
BERHAK MENGHUKUM (ANKUM)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh

ALDO AKMAN

NIM. 2235137

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**SINKRONISASI HUKUM PIDANA DAN ETIK POLRI DALAM KASUS
PERZINAAN ANGGOTA POLRI: PROPORSIONALITAS SANKSI DAN
KEWENANGAN DISKRESI ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM
(ANKUM)**

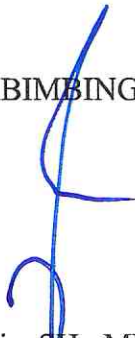
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Penyusun:

ALDO AKMAN
NIM. 2235137

PEMBIMBING I



Rise Karmilia, S.H., M.H., Ph. D
NIDN. 1004068502

PEMBIMBING II



Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A
NIDN. 1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Proposal penelitian ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2025.

Tim Penguji:

Ketua : Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D

Sekretaris : Zulkifli, SH., MH., C.L.A

Anggota 1 : Hendri, SH, MH., CPLC., CPLCE

Anggota 2 : Dr. H. Nofrizal, Lc., MH

Anggota 3 : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Aldo Akman

NIM : 2235137

Bidang Minat : Hukum Pidana

Judul : Sinkronisasi Hukum Pidana dan Etik Polri dalam Kasus Perzinaan
Anggota Polri: Proporsionalitas Sanksi dan Kewenangan Diskresi
Ankum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pengaraian, 2025
Yang membuat pernyataan,



ALDO AKMAN
NIM. 2235137

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penjatuhan sanksi etik dalam dua putusan KKEP terhadap tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh anggota Polri, yakni sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Putusan KKEP Nomor PUT.KKEP/02/I/2024/KKEP tanggal 31 Januari 2024 dan sanksi penempatan dalam tempat khusus (PATSUS) dalam Putusan KKEP Nomor PUT.KKEP/20/XI/2023/KKEP tanggal 13 November 2023. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum etik Polri serta dasar pertimbangan ANKUM dalam memberlakukan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi penerapan hukum pidana dan etik Polri dalam kasus perzinaan anggota Polri serta mengkaji pertimbangan ANKUM dalam pemberlakuan hukum terhadap perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 284 ayat (1) KUHP sebagai delik aduan telah sinkron dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan PPRI Nomor 1 Tahun 2003, di mana sanksi etik dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, perbedaan sanksi PTDH dan PATSUS menunjukkan penggunaan diskresi ANKUM yang proporsional dengan mempertimbangkan tuntutan pelapor, status sosial para pihak, serta dampak perbuatan terhadap kehormatan institusi Polri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kata Kunci: Sinkronisasi, Perzinaan, Etik Polri, Ankum

ABSTRACT

This study is motivated by differences in the imposition of ethical sanctions in two decisions of the Indonesian National Police Code of Ethics Commission concerning the criminal act of adultery committed by police officers, namely the sanction of Dismissal Without Respect (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH) in KKEP Decision Number PUT.KKEP/02/I/2024/KKEP dated 31 January 2024 and the sanction of placement in a special detention facility (Penempatan Dalam Tempat Khusus/PATSUS) in KKEP Decision Number PUT.KKEP/20/XI/2023/KKEP dated 13 November 2023. These differences raise questions regarding the synchronization between criminal law and the Indonesian National Police ethical legal framework, as well as the basis of consideration used by ANKUM in imposing sanctions. The purpose of this study is to analyze the synchronization of the application of criminal law and Police ethics in cases of adultery committed by police officers and to examine the considerations of ANKUM in enforcing the law against such conduct. The research method employed is empirical juridical, using a statutory approach and interviews. The findings indicate that the application of Article 284 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) as a complaint-based offense (delik aduan) is synchronized with Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 on the Police Professional Code of Ethics and Government Regulation Number 1 of 2003, whereby ethical sanctions are imposed after a court decision has obtained permanent legal force. Furthermore, the differing sanctions of PTDH and PATSUS demonstrate the proportional exercise of ANKUM's discretionary authority by taking into account the complainant's demands, the social status of the parties involved, and the impact of the conduct on the honor and integrity of the Indonesian National Police institution, in accordance with Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police and Government Regulation Number 2 of 2003 on the Disciplinary Regulations of Members of the Indonesian National Police.

Keywords: *Synchronization, Adultery, Police Ethics, ANKUM*

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pun judul Skripsi ini yaitu “Sinkronisasi Hukum Pidana dan Etik Polri dalam Kasus Perzinaan Anggota Polri: Proporsionalitas Sanksi dan Kewenangan Diskresi Ankuam”. Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian Skripsi ini, namun dalam prosesnya penulis tidak sendiri, melainkan penulis juga didukung dan dimotivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti
3. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A selaku Pembimbing II yang telah membina dan memberikan nasihat dalam proses penelitian ini
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
5. Untuk keluarga tercinta, serta untuk Ibu dan Ayah tersayang yang selalu mendoakan serta memberi semangat dalam proses ini. Serta tidak lupa juga untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa yang memberi dukungan dalam penulisan proposal penelitian ini

Pasir Pengaraian, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penegakan Hukum	11
2.2 Tindak Pidana.....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.3 Tindak Perzinahan.....	22
2.4 Teori Etika Profesi Polri	23
2.5 Kewenangan Anlum.....	26
2.6 Disharmoni Hukum.....	29
2.7 Teori Proporsionalitas	31
2.8 Teori Diskresi.....	33
2.9 Disparitas Penjatuhan Sanksi (<i>Sentencing Disparity</i>).....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian	39
3.3 Sumber Data.....	39

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Teknik Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Sinkronisasi Hukum Pidana Dan Etik Polri Dalam Kasus Perzinaan Anggota Polri Berdasarkan Asas Proporsionalitas Sanksi Dan Kewenangan Diskresi ANKUM	43
4.1.1 Temuan Lapangan.....	46
4.1.2 Analisis Berdasarkan Kesesuaian Peraturan	52
4.1.3 Analisis Berdasarkan Asas Proporsionalitas Sanksi	62
4.1.4 Analisis Berdasarkan Disparitas Penjatuhan Sanksi (<i>Sentencing Disparity</i>)	65
4.1.5 Analisis Berdasarkan Teori Diskresi Kewenangan ANKUM	69
4.1.6 Analisis Berdasarkan Sinkronisasi Hukum Pidana Dan Etik Polri.....	72
4.2 Pertimbangan ANKUM Dalam Pemberlakuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.....	77
4.2.1 Analisis terhadap Pertimbangan ANKUM Dalam PUT.KKEP/20/XI/2023/KKEP TGL 13 NOVEMBER 2023	78
4.2.2 Analisis terhadap Pertimbangan ANKUM Dalam PUT.KKEP/02/I/2024/KKEP TGL 31 JANUARI 2024.....	80
4.2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemberlakuan Hukum dalam putusan ANKUM	85
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Rekapitulasi Analisis Peneliti Terhadap Perbedaan Putusan	61
Tabel 4. 2. Analisis Peneliti Berdasarkan Peraturan dan Teori.....	76
Tabel 4. 3. Perbedaan Status Sosial Pelaku dan Pelapor.....	88